

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PROGRAM PEMBERDAYAAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KOTA BITUNG

Ricky Fernando Alexander Sumolang¹
Novie Pioh²
Josef Kairupan³

Abstrak

Kemiskinan merupakan fenomena global yang sangat memprihatinkan, bagaimana tidak, dari tahun ke tahun masalah kemiskinan ini tidak kunjung surut bahkan cenderung meningkat seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat serta menurunnya kondisi perekonomian di negara Indonesia. Kemiskinan di Kota Bitung, penduduk miskin pada tahun 2013 mencapai 12.9 (ribu jiwa) dan mencapai puncaknya pada tahun 2015 yaitu sebesar 14.13 (ribu jiwa) dimana waktu itu di tahun 2015 jumlah penduduk Kota Bitung mencapai 205.675 (ribu jiwa). Dan dengan adanya segala usaha yang terus dilakukan oleh pemerintah Kota Bitung maka pemerintah dapat menekan angka kemiskinan dalam hal ini terjadi penurunan dari tahun 2015 ke tahun 2016 dimana jumlah penduduk miskin menjadi 13.64 (ribu jiwa). Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia, dalam Perpres No.13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, pemerintah secara tegas menetapkan upaya penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Sasaran utama dalam pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat miskin. Permasalahan yang umum terjadi kaitannya didalam penanggulangan kemiskinan yaitu dimana program pengentasan kemiskinan tersebut cenderung belum efektif, program pemerintah tidak mampu tersampaikan dan berjalan sinkron dengan masyarakat, Sumber Daya Manusia yang belum terkelolah dengan baik sehingga dapat menyebabkan program-program pemerintah tidak berjalan dengan baik di masyarakat, dan juga partisipasi masyarakat dalam program pengentasan kemiskinan masih bersifat semu dimana belum berbasis kemandirian sehingga belum melembaga pada masyarakat miskin.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pemberdayaan, Penanggulangan Kemiskinan

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

² Ketua Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

³ Sekretaris Penguji/Dosen Pembimbing Skripsi

Pendahuluan

Permasalahan kemiskinan di Kota Bitung merupakan permasalahan yang terjadi dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah penduduk miskin di Kota Bitung memperlihatkan adanya peningkatan dan penurunan dari tahun ke tahun, misalnya pada tahun 2013-2015 dimana jumlah penduduk miskin terus meningkat, namun kemudian terjadi penurunan jumlah penduduk miskin pada tahun 2016. Penduduk miskin pada tahun 2013 mencapai 12.9 (ribu jiwa) dan mencapai puncaknya pada tahun 2015 yaitu sebesar 14.13 (ribu jiwa) dimana waktu itu di tahun 2015 jumlah penduduk Kota Bitung mencapai 205.675 (ribu jiwa). Dan dengan adanya segala usaha yang terus dilakukan oleh pemerintah Kota Bitung maka pemerintah dapat menekan angka kemiskinan dalam hal ini terjadi penurunan dari tahun 2015 ke tahun 2016 dimana jumlah penduduk miskin menjadi 13.64 (ribu jiwa).

Kota Bitung merupakan salah satu kota di provinsi Sulawesi Utara. Kotaini memiliki perkembangan yang cepat karena terdapat pelabuhan laut yang mendorong percepatan pembangunan. Perekonomian Kota Bitung didominasi oleh sektor pertanian dan perkebunan, namun dalam perkembangannya sektor industri ternyata berkembang cukup pesat dan mencapai nilai tertinggi. Bertumbuhnya sektor industri sangat membantu perekonomian terutama dengan meluasnya kesempatan kerja terutama peluang bagi penduduk miskin untuk mendapatkan pekerjaan.

Berdasarkan UUD Negara Republik Indonesia, dalam Peraturan Presiden No.13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, pemerintah secara tegas menetapkan upaya penanggulangan kemiskinan sebagai salah satu prioritas untuk meningkatkan kesejahteraan dan

kesempatan kerja masyarakat miskin secara mandiri. Untuk itu pemerintah memiliki peranan penting dalam mengimplementasi kebijakan guna menanggulangi kemiskinan yang ada. Berikut adalah fungsi-fungsi pemerintahan di Indonesia antara lain yaitu: fungsi pengaturan, pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan. Pelaksanaan fungsi pengaturan yang lazim dikenal sebagai fungsi regulasi dengan segala bentuknya, dimaksudkan sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi lebih kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas disegala bidang kehidupan, selain terciptanya tatanan sosial yang baik diberbagai kehidupan masyarakat. Fungsi pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat. Fungsi pemberdayaan akan mendorong kemandirian masyarakat, dan fungsi pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. Oleh karena itu, seiring dengan hasil pembangunan dan pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah, serta keterbatasan yang dimiliki pemerintah, maka secara perlahan masyarakat dituntut untuk secara mandiri mencukupi kebutuhannya.

Agar lebih dapat memantapkan dan mensukseskan program-program perencanaan pembangunan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah, sangat perlu mengikutsertakan dan memberdayakan seluruh lapisan masyarakat sebagaimana UU No.25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, yang dalamnya mengamanatkan pola perencanaan pembangunan yang berbasis masyarakat sehingga diharapkan proses dan hasil pembangunan yang sudah dihasilkan dapat dinikmati oleh masyarakat.

Sasaran utama dalam pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat miskin. Keberpihakan pemerintah, khususnya

pada pemberdayaan masyarakat yang kurang mampu dan menderita sangat diperlukan. Keberpihakan ini merupakan langkah strategis yang manusiawi sebagai wujud nyata dari kewajiban luhur untuk memenuhi tuntutan rakyat yang memberikan kepercayaan kepada pemerintah. Dalam hal ini berbagai usaha terus dilakukan oleh pemerintah terutama pemerintah Kota Bitung untuk menekan angka kemiskinan. Hal ini dibuktikan dengan adanya berbagai program yang menjadi prioritas pembangunan untuk menanggulangi kemiskinan dan melayani masyarakat setempat. Program-program yang digagas pemerintah Kota Bitung yaitu pembangunan dan pengembangan infrastruktur dasar, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, percepatan penanggulangan kemiskinan dan pengangguran. Dalam hal ini pemerintah Kota Bitung sendiri telah memiliki program untuk masalah kemiskinan, akan tetapi kemiskinan tetap menjadi mimpi buruk dan terus memabayang-bayangi perkembangan Kota Bitung. Kemiskinan di antara pertumbuhan dan perkembangan kota potensial ini merupakan momok yang harus dipikirkan bagaimana penyelesaiannya.

Dalam pengamatan dilapangan ditemukan bahwa ada berbagai permasalahan umum yang terjadi dalam kaitan dengan kebijakan penanggulangan kemiskinan antara lain yaitu: bahwa telah banyak program yang diimplementasikan namun program pengentasan kemiskinan tersebut cenderung belum efektif sebab kurang menjamin peningkatan usaha produktif yang berkelanjutan bagi masyarakat miskin, program pemerintah tidak mampu tersampaikan dan berjalan sinkron dengan masyarakat, seringkali masih terdapat ego sektoral dalam program penanggulangan kemiskinan

karena realisasi anggaran tidak mengarah pada investasi jangka panjang melainkan pada penerapan program yang masih berorientasi pada proyek dan bukan pada output program, Sumber Daya Manusia (SDM) yang belum terkelola dengan baik sehingga menyebabkan program-program pemerintah tidak berjalan dengan baik di masyarakat, dan juga partisipasi masyarakat dalam program pengentasan kemiskinan masih bersifat semu dimana belum berbasis kemandirian sehingga belum melembaga pada masyarakat miskin.

Tinjauan Pustaka

Implementasi merupakan tindakan pelaksanaan dari suatu rencana yang telah disusun dengan matang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia implementasi dapat diartikan sebagai penerapan sesuatu yang telah dirancang atau dibuat secara matang, sehingga pengerjaannya dapat dilakukan dengan penuh keyakinan dan tujuan yang jelas. Kebijakan adalah serangkaian tindakan yang dibuat oleh seseorang atau kelompok orang dalam rangka menciptakan suatu kondisi yang statis oleh karena suatu situasi yang ditandai dengan berbagai masalah. Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program atau melalui formulasi kebijakan turunan dari kebijakan publik tersebut. Rangkaian implementasi kebijakan dapat diamati dengan jelas yaitu dimulai dari program, ke proyek dan ke kegiatan. Model tersebut mengadaptasi mekanisme yang lazim dalam manajemen, khususnya manajemen sektor publik. Kebijakan diturunkan berupa program program

yang kemudian diturunkan menjadi proyek proyek, dan akhirnya berwujud pada kegiatan-kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun kerjasama pemerintah dengan masyarakat.

Van Meter dan Van Horn (dalam Budi Winarno, 2008:146-147) mendefinisikan implementasi kebijakan publik sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang diciptakan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier 1979 sebagaimana dikutip (dalam Solichin Abdul Wahab, 2008:65), mengatakan bahwa : Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijaksanaan negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Jadi implementasi merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh berbagai aktor sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai

denga tujuan-tujuan atau sasaran-sasaran kebijakan itu sendiri.

Kebijakan pemerintah sangat terkait dengan masalah-masalah publik atau masalah-masalah pemerintah yang ada pada suatu negara. Kenyataannya kebijakan telah banyak membantu para pelaksana pada tingkat birokrasi pemerintah maupun para politisi untuk memecahkan masalah-masalah publik. Kebijakan publik dapat dikatakan merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan oleh pemerintah demi kepentingan kelompok-kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat.

Menurut PBB Perserikatan Bangsa-Bangsa (dalam Wahab, 2005:2) kebijakan diartikan sebagai pedoman untuk bertindak. Pedoman itu boleh jadi amat sederhana atau kompleks, bersifat umum atau khusus, luas atau sempit, kabur atau jelas, longgar atau sempit, bersifat kualitatif atau kuantitatif, publik atau privat. Kebijakan dalam maknanya seperti ini mungkin berupa suatu deklarasi mengenai suatu dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu dalam suatu rencana.

Pengertian lainnya dikemukakan oleh Richard Rose (dalam Winarno, 2012:20) menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan sendiri. Berdasarkan definisi ini Rose menegaskan bahwa kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekedar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Carl J. Federich sebagaimana dikutip (dalam Agustino, 2008:7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau

pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan terhadap pelaksana usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memilikimaksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Secara singkat Thomas R Dye (dalam Edi Suharto, 2010:44) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan ataupun untuk tidak dilakukan. Sementara itu Anderson (dalam Edi Suharto, 2010:44) menyatakan secara lebih spesifik bahwa kebijakan publik sebagai sebuah jalan aksi yang sengaja diambil oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam menyelesaikan satu masalah atau sejumlah fokus permasalahan.

Istilah pemberdayaan semakin populer dalam konteks pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Konsep pemberdayaan ini berkembang dari realitas individu atau masyarakat yang tidak berdaya atau pihak yang lemah (powerless). Ketidakberdayaan atau memiliki kelemahan dalam aspek pengetahuan, pengalaman, sikap, keterampilan, modal usaha, semangat, kerja keras, ketekunan dan aspek lainnya. Kelemahan dalam berbagai aspek tadi mengakibatkan ketergantungan, ketidakberdayaan, dan kemiskinan.

Pemberdayaan (empowerment) merupakan konsep yang berkaitan dengan kekuasaan (power). Istilah kekuasaan seringkali identik dengan kemampuan individu untuk membuat dirinya atau pihak lain melakukan apa yang diinginkannya. Kemampuan

tersebut baik untuk mengatur dirinya, mengatur orang lain sebagai individu atau kelompok/organisasi, terlepas dari kebutuhan, potensi, atau keinginan orang lain. Dengan kata lain, kekuasaan menjadikan orang lain sebagai objek dari pengaruh atau keinginan dirinya.

Pemberdayaan menurut Djohani 2003 (dalam Anwas, 2013:49) buku yang berjudul Pemberdayaan Masyarakat di Era Global dimana pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/kekuasaan (power) kepada pihak yang lemah (powerless), dan mengurangi kekuasaan (disempowered) kepada pihak yang terlalu berkuasa (powerfull) sehingga terjadi keseimbangan.

Begitu pula menurut Rappaport 1984 (dalam Anwas, 2013:49) pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan tersebut menekankan pada aspek pendelegasian kekuasaan, memberi wewenang, atau pengalihan kekuasaan kepada individu atau masyarakat sehingga mampu mengatur diri dan lingkungannya sesuai dengan keinginan potensi, dan kemampuan yang dimilikinya. Pemberdayaan tidak sekedar memberikan kewenangan atau kekuasaan kepada pihak yang lemah saja. Dalam pemberdayaan terkandung makna proses pendidikan dalam meningkatkan kualitas individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mampu berdaya, memiliki daya saing, serta mampu hidup mandiri.

Secara lebih rinci Slamet 2003 (dalam Anwas, 2013:49), menekankan bahwa hakikat pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri. Istilah mampu disini mengandung makna berdaya, paham, termotivasi, memiliki kesempatan, melihat dan

memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, tahu sebagai alternatif, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertindak inisiatif.

Sedangkan indikator pemberdayaan menurut Edi Suharto (2006:50) paling tidak memiliki empat hal yaitu: merupakan kegiatan yang terencana dan kolektif, memperbaiki kehidupan masyarakat, prioritas bagi kelompok lemah atau kurang beruntung, serta dilakukan melalui program peningkatan kapasitas. Dalam pelaksanaannya, pemberdayaan memiliki makna dorongan atau motivasi, bimbingan, atau pendampingan dalam meningkatkan kemampuan individu atau masyarakat untuk mampu mandiri. Upaya tersebut merupakan sebuah tahapan dari proses pemberdayaan dalam mengubah perilaku, mengubah kebiasaan lama menuju perilaku baru yang lebih baik, dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraannya. Pemberdayaan juga dapat dipandang sebagai upaya meningkatkan harkat dan martabat individu dan masyarakat.

Pemberdayaan juga memiliki makna menghidupkan kembali tatanan nilai, budaya, dan kearifan lokal dalam membangun jati dirinya sebagai individu dan masyarakat. Misalnya, menghidupkan kembali sifat gotong royong dan tolong menolong dalam masyarakat Indonesia terutama di daerah perkotaan, merupakan salah satu wujud/bentuk pemberdayaan masyarakat. Penuntasan kemiskinan dapat dicapai dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat. Karena melalui kegiatan pemberdayaan semua potensi yang dimiliki masyarakat didorong dan ditingkatkan untuk berdaya dalam melawan faktor-faktor yang menyebabkan kemiskinan. Kegiatan pemberdayaan tersebut

dilakukan melalui berbagai kegiatan yang dapat mendorong kemampuan dan keterampilan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan masyarakat, menciptakan berbagai kesempatan kerja, menghidupkan kembali budaya dan kearifan-kearifan lokal sebagai modal sosial, serta mengubah pemikiran masyarakat untuk lebih berdaya dan mandiri.

Berdasarkan definisi-definisi pemberdayaan diatas, dapat dinyatakan bahwa pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses pemberdayaan adalah serangkaian untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, yaitu masyarakat miskin yang berdaya, memiliki kekuasaan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses.

Dalam kamus ilmiah populer, kata miskin mengandung arti tidak berharta (harta yang ada tidak mencukupi kebutuhan). Adapun kata fakir diartikan sebagai orang yang sangat miskin. Secara etimologi makna yang terkandung yaitu bahwa kemiskinan sarat dengan masalah konsumsi. Hal ini bermula sejak masa neo klasik dimana kemiskinan hanya dilihat dari interaksi negatif (ketidak seimbangan) antara pekerja dan upah yang diperoleh. Menurut Edy Suandi Hamid (2008:13)

seiring dengan perkembangan zaman terjadi pergeseran pengertian kemiskinan dengan tidak melihat aspek pendapatan dan konsumsi saja, tetapi juga melihat masalah ketergantungan, harga diri, kontinuitas pendapatan dan sebagainya.

Berdasarkan deskripsi BAPPENAS 2004 (BPS, 2006:11) yang dimaksud dengan kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang, tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar antara lain: a. Terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya, dan lingkungan hidup, b. Rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, c. Hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, berangkat dari rumusan masalah dan disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai, maka jenis penelitian ini menggunakan jenis atau metode penelitian kualitatif. Model penelitian kualitatif ini biasanya digunakan dalam pengamatan dan penelitian sosial. Menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2007:3) mengemukakan bahwa metodologi kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Fokus masalah penelitian ini berorientasi pada masalah penelitian, yaitu dengan kita melihat bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dalam program pemberdayaan penanggulangan kemiskinan, dengan melihat empat faktor yang menjadi kriteria penting dalam implementasi

kebijakan yang sebagaimana dikemukakan oleh Edwards III yaitu diantaranya :

1. Komunikasi
2. Sumberdaya
3. Disposisi
4. Struktur Birokrasi

Informan yang dilibatkan merupakan orang yang dapat memberikan informasi tentang situasi dan kondisi, menguasai permasalahan secara mendalam, serta dapat dipercaya untuk menjadi sumber data. Yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu diantaranya :

- Kepala Dinas Sosial (1 orang)
- Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial (1 orang)
- Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin (1 orang)
- Masyarakat Miskin (5 orang)

Hasil Penelitian

1. Komunikasi

Berdasarkan informasi yang telah peneliti temukan dilapangan melalui wawancara dengan berbagai stake holder yang ada dilapangan (Kepala Dinas Sosial, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Masyarakat Miskin di Kota Bitung) tentang implementasi kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan peneliti menemukan bahwa komunikasi yang dilakukan pemerintah dalam hal ini dinas sosial dalam rangka pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan di kota bitung sudah cukup baik namun belum tersampaikan dengan baik kepada masyarakat miskin penerima program pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan di Kota Bitung.

2. Sumber Daya

Berdasarkan informasi yang peneliti temukan dilapangan melalui wawancara dengan berbagai stake holder yang ada

dilapangan (Kepala Dinas Sosial, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Masyarakat Miskin di Kota Bitung) tentang implementasi kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan, menurut peneliti sumberdaya yang ada di dinas sosial kota bitung sudahlah cukup sesuai, namun dalam menjalankan tugas dan fungsi dari masing-masing sumberdaya yang ada masih belum dijalankan secara maksimal.

3. Disposisi

Berdasarkan informasi yang peneliti temukan dilapangan melalui wawancara dengan berbagai stake holder yang ada dilapangan (Kepala Dinas Sosial, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Masyarakat Miskin di Kota Bitung) tentang implementasi kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan, menurut peneliti dari pengamatan di lapangan bahwa kesungguhan dari aparat/dinas sosial secara keseluruhan cukuplah baik dalam mengimplementasikan kebijakan pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan di kota bitung. Kendati demikian masalah harus dimaksimalkan lagi.

4. Struktur Birokrasi

Berdasarkan informasi yang peneliti temukan dilapangan melalui wawancara dengan berbagai stake holder yang ada dilapangan (Kepala Dinas Sosial, Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial, Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin dan Masyarakat Miskin di Kota Bitung) tentang implementasi kebijakan pemerintah dalam pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan, menurut peneliti struktur birokrasi yang ada di dinas sosial cukup baik dan berjalan sebagaimana mestinya walaupun di lapangan masih terjadi berbagai kekurangan.

Kesimpulan

1. Dari hasil penelitian penulis dilapangan bahwa implementasi kebijakan pemerintah dalam program pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan di Kota Bitung ditinjau dari Komunikasi yang dilakukan oleh pihak yang terkait dinas sosial cukuplah baik, walaupun masih ada pihak-pihak yang merasa kurang puas.
2. Pengimplementasian kebijakan dalam konteks sumber daya yang ada di dinas sosial di Kota Bitung sudah cukup mumpuni dan jika di maksimalkan tentunya pemerintah akan memperoleh hasil yang maksimal sebagaimana tujuan dari program yang ada, salah satunya Program Keluarga Harapan.
3. Disposisi, dalam hal ini masih kurang dalam aspek insentif sehingga perlu untuk ditambahkan.
4. Struktur Birokrasi, masih terkendala dalam aspek fragmentasi dan regulasi sehingga membutuhkan partisipasi aktif dari semua pihak yang terlibat baik itu masyarakat yang menjadi sasaran bantuan maupun pelaksana program ini.

Saran

1. Pemerintah Kota Bitung dalam hal ini Dinas Sosial sebagai OPD teknis yang terlibat langsung dalam Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan lebih meningkatkan kualitas komunikasi bahkan harus melancarkan komunikasi secara persuasive, terlebih khusus terhadap masyarakat terdampak Program Pemberdayaan dan Penanggulangan Kemiskinan.
2. Sumberdaya yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Bitung harus lebih ditingkatkan baik dari segi kuantitas maupun kualitas, sebagai contoh dalam perekrutan tenaga pendamping PKH haruslah merekrut orang yang

benar-benar paham akan tugas dan fungsi dari tenaga pendamping Program Keluarga Harapan agar tujuan dari program tersebut boleh tersampaikan dengan baik dan boleh dikembangkan oleh masyarakat miskin kota bitung yang terdampak dari program yang dimaksud.

3. Motifasi kerja yang dimiliki oleh tenaga yang dimiliki oleh Dinas Sosial Kota Bitung harus lebih ditingkatkan lagi.
4. Regulasi yang ada pada saat ini baik yang mengatur tentang struktur birokrasi di Dinas Sosial dalam hal pelaksanaan teknis program maupun regulasi pengurusan kelengkapan atau persyaratan yang di perlukan oleh masyarakat terdampak program harus diperbaiki lagi dan harus lebih berpihak pada masyarakat miskin tentunya.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. 2008. Dasar-Dasar Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta.
- Anwas, O. M. 2013. Pemberdayaan Masyarakat Di Era Global. Bandung: Alfabeta.
- Badan Pusat Statistik. Garis Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2003-2016. Kota Bitung.
- Badan Pusat Statistik. Jakarta Pusat 2006. Pendataan Sosial Ekonomi. Jakarta Pusat: Badan Pusat Statistik.
- Hamid, E. S. 2008. Sistem Ekonomi dan Pemberantasan Kemiskinan. Jakarta: Lembaga Penelitian SMERU Research Institute.
- Moleong, L. 2007. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Karya.
- Solichin, A. W. 2005. Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta: PT. Bumi Akasara.
- Solichin, A. W. 2008. Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara. Edisi Kedua. Jakarta: PT. Bumi Akasara.
- Subarsono, A. G. 2011. Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Suharto, E. 2006. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Bandung: Refika Aditama.
- Suharto, E. 2010. Analisis Kebijakan Publik (paduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan sosial). Bandung: Alfabeta.
- Wijayanto, R. D. 2010. Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan di Kabupaten / Kota Jawa Tengah Tahun 2005-2008. Skripsi. Semarang: Universitas Di Ponerogo.
- Winarno, B. 2008. Kebijakan Publik: Teori dan Proses. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Winarno, B. 2012. Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: Caps.
- Peraturan Daerah Kota Bitung No. 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung.
- Peraturan Walikota Bitung No. 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Bitung.
- Peraturan Presiden No.13 Tahun 2009 tentang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan.
- Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.